

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan daerah adalah salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten atau kota dalam rangka otonomi daerah pada saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian suatu daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Saleh, 2003).

Menurut Mangkosubroto (1997) mengungkapkan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan guna membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan non pajak. Penerimaan non pajak misalnya adalah penerimaan pemerintah yang didapatkan dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Dalam undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bab V (lima) No. 1 (satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari :

##### **1) Pajak Daerah**

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud Pajak Daerah adalah kontribusi

wajib pajak terhadap daerah yang tertuang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan dimanfaatkan guna keperluan daerah bagi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah terdiri dari :

a) Pajak Provinsi

(1) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea balik nama kendaraan bermotor adalah jenis pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

(4) Pajak Air Permukaan

Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air

yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk di dalamnya air laut.

(5) Pajak Rokok

Pajak rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

b) Pajak Kabupaten/Kota

(1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahayan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar.

(2) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

(3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan keramaian yang dinikmati dengan dipungut biaya.

(4) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang dengan tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum.

(5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

(6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan permukaan bumi untuk dapat dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

(7) Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha ataupun yang disediakan sebagai suatu usaha,

termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

(8) Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

(9) Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung walet.

(10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah atas pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah atau perairan pedalaman atau laut.

(11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas

tanah atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta dengan bangunan di atasnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

## 2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah muncul akibat adanya suatu balas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah pemungut retribusi. Diharapkan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu :

- a) Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b) Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- c) Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah atau disebut BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN) dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan tentang Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan salah satu penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengklasifikasi yang termasuk dalam pendapatan asli daerah meliputi beberapa hal, yaitu :

- a) Hal penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b) Jasa/Giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Keuntungan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e) Komisi, potonga, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang maupun jasa oleh pemerintah daerah.

## **2. Pariwisata**

### **a. Definisi Pariwisata**

Banyak sekali definisi dari pariwisata, tetapi disini akan lebih ditekankan pengertian dasar pariwisata. Ada sifat dasar dari pariwisata (Direktorat Jendral Pariwisata) sebagai berikut :

- 1) Pariwisata timbul dari perpindahan orang-orang dan tinggalnya mereka di berbagai daerah tujuan.
- 2) Ada dua elemen pariwisata, yaitu perjalanan ke daerah tujuan dan tinggal sementara termasuk semua kegiatan selama tinggal di daerah tujuan.
- 3) Perjalanan ke dan tinggalnya wisatawan di tempat tujuan, tentunya di luar tempat dimana biasanya wisatawan tinggal dan bekerja, sehingga tingkah dan kegiatannya akan kelihatan berbeda dengan penduduk setempat. Perpindahan yang tersebut dalam point 2 bersifat sementara atau singkat dan dengan adanya niat untuk



kembali ke tempat asal dalam waktu beberapa hari atau beberapa minggu ataupun dalam beberapa bulan.

4) Tujuan kunjungan bukan untuk bekerja, melainkan vocational.

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, dari suatu tempat ke tempat lain, dengan maksud tujuan bukan berusaha (business) atau mencari nafkah di tempat yang ia kunjungi, tetapi semata-mata sebagai konsumen menikmati perjalanan tersebut untuk memenuhi keinginan yang bermacam-macam (Yoeti, 1997).

Keinginan yang bermacam-macam di sini adalah barang-barang kebutuhan yang diperlukannya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya tadi. Jadi memuaskan kebutuhan itulah yang menjadi dorongan bagi orang-orang untuk melakukan perjalanan wisata dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu Negara menuju Negara lain. Bagi suatu Negara yang mengembangkan sektor pariwisata dengan baik pasti akan banyak didatangi wisatawan dan dengan kedatangan wisatawan tersebut akan memberikan dampak terhadap Negara atau daerah yang dikunjungi.

Menurut Burkart dan Medik (1987). Pariwisata adalah perpindahan orang untuk sementara dan dalam jangka waktu pendek ke tujuan-tujuan diluar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu.

Pariwisata merupakan suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri atau di luar negeri, yang meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari keputusan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

#### **b. Jenis Pariwisata**

Menurut Spillane (1987), pariwisata terdiri dari enam jenis yaitu diantaranya adalah :

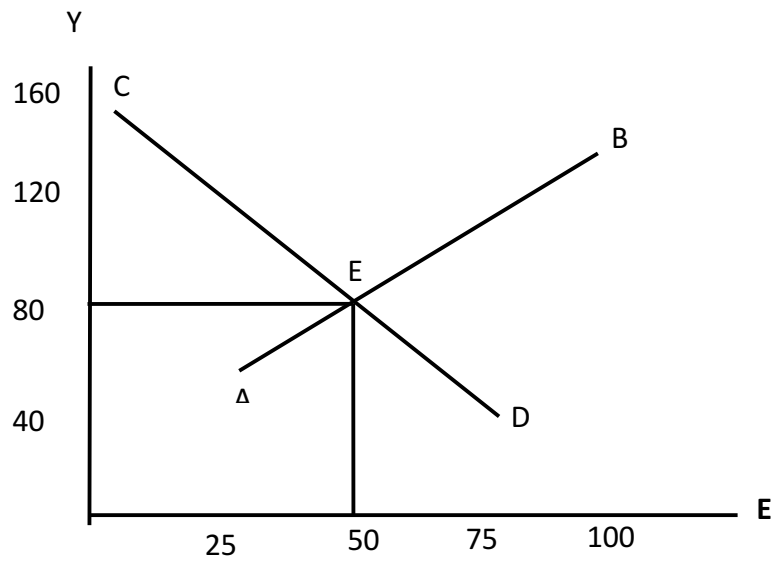
- 1) Pariwisata untuk menikmati perjalanan (*pleasure tourism*), pariwisata ini dilakukan oleh wisatawan dengan tujuan untuk berlibur atau mencari kesengan, untuk melihat dan menikmati suatu hal baru, untuk menikmati hiburan di kota-kota besar, dan ikut serta dalam keramaian pariwisata.
- 2) Pariwisata untuk rekreasi (*recreations tourism*) merupakan pariwisata dengan tujuan wisatawan adalah untuk memanfaatkan hari liburnya dengan beristirahat, memulihkan kembali kesegaran jasmani dan rohani, serta dalam keramaian.
- 3) Pariwisata untuk kebudayaan (*culture tourism*) merupakan kegiatan wisata dengan tujuan wisatawan ingin mengetahui kebudayaan suatu Negara mauoun daerah, mengunjungi monument bersejarah, mempelajari adat-istiadat, mengunjungi pusat kesenian dan pusat keagamaan.

- 4) Pariwisata untuk olahraga (*sport tourism*) merupakan wisata yang dilakukan oleh wisatawan yang sengaja berpergian untuk tujuan olahraga, baik melakukan kegiatan olahraga, maupun menghadiri acara-acara olahraga.
- 5) Pariwisata untuk keperluan bisnis (*business tourism*) merupakan kegiatan wisata yang dilakukan oleh orang-orang yang secara profesional melakukan perjalanan untuk keperluan bisnis.
- 6) Pariwisata untuk konvensi (*convention tourism*) merupakan wisata yang dilakukan wisatawan dengan tujuan menghadiri konvensi atau konferensi.

### **c. Penawaran Pariwisata**

Pengertian penawaran pariwisata meliputi semua macam produk dan pelayanan/jasa yang dihasilkan oleh kelompok perusahaan industri pariwisata sebagai pemasok, yang ditawarkan baik kepada wisatawan yang datang secara langsung maupun yang membeli melalui agen perjalanan (AP) atau biro perjalanan wisata (BPW) sebagai perantara (Yoeti, 2008).

Adapun harga yang diinginkan konsumen (wisatawan akan terbentuknya bila tingkat harga yang diinginkan sama dengan jumlah kamar yang tersedia seperti ditunjukkan oleh titik E (equilibrium), yaitu titik perpotongan kurva permintaan AB dan CD, seperti tampak pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1**  
Titik Equilibrium  
Permintaan Kamar Hotel (dalam Ribuan)  
*Sumber : Yoeti, 2008*

Keseimbangan penawaran dan permintaan dikatakan stasioner dalam arti bahwa sekali harga keseimbangan tercapai, biasanya cenderung untuk tetap dan tidak berubah. Dengan kata lain, jika tidak ada pergeseran penawaran maupun permintaan, tidak ada yang mempengaruhi harga akan mengalami perubahan.

Menurut Spillane (1987), penawaran pariwisata dapat dibagi menjadi :

1) Proses produksi industri pariwisata

Kemajuan pengembangan pariwisata sebagai industri ditunjang oleh bermacam-macam usaha yang perlu, antara lain :

- a. Promosi untuk memperkenalkan objek wisata
- b. Transportasi yang lancer

- c. Kemudahan keimigrasian atau birokrasi
  - d. Akomodasi yang menjamin penginapan yang nyaman
  - e. Pemandu wisata yang cakap
  - f. Penawaran barang dan jasa dengan mutu terjamin dan arif harga yang wajar
  - g. Pengisian waktu dengan atraksi-atraksi yang menarik
  - h. Kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup
- 2) Penyediaan lapangan kerja

Perkembangan pariwisata berpengaruh positif terhadap perluasan kesempatan kerja. Berkembangnya suatu daerah pariwisata tidak hanya membuka lapangan kerja bagi penduduk setempat, tetapi juga menarik pendatang-pendatang baru dari luar daerah justru karena tersedianya lapangan kerja.

3) Penyediaan Infrastruktur

Indusri pariwisata juga memerlukan prasarana ekonomi, seperti jalan raya, jembatan, terminal, pelabuhan, lapangan udara. Jelas bahwa hasil-hasil pembangunan fisik bisa ikut mendukung pengembangan pariwisata.

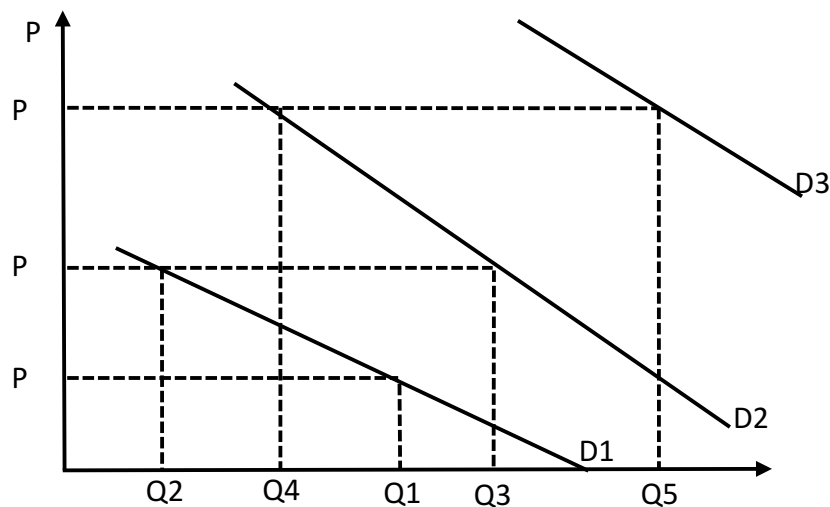
4) Penawaran jasa keuangan

Tata cara hidup yang tradisional dari suatu masyarakat juga merupakan salah satu sumber yang sangat penting untuk ditawarkan kepada para wisatawan. Bagaimana kebiasaan hidupnya, adat istiadatnya, semuanya merupakan daya Tarik bagi wisatawan untuk

datang ke suatu daerah. Hal ini dapat dijadikan sebagai event yang dapat dijual oleh pemerintah setempat Yoeti (2008).

#### d. Permintaan Pariwisata

Pariwisata dipandang sebagai suatu jasa yang sangat disukai (*preferend goods or service*), karena lebih banyak dilakukan ketika pendapatan meningkat. Di saat banyak keluarga yang memasuki kelompok pendapatan lebih tinggi, maka permintaan untuk berwisata meningkat lebih cepat dari pendapatan, Harrison (Laundberg, 1997) membuat kurva permintaan individual Veblen seperti yang terlihat pada Gambar 2.2



**Gambar 2.2**  
Kurva Permintaan Individual Veblen

Bila harga ditetapkan adalah  $P_1$  maka produk yang terjual adalah  $Q_1$ . Bila harga dinaikkan menjadi  $P_2$  menurut kurva  $D_1$ , maka harga jumlah barang yang dibeli akan turun menjadi  $Q_2$ . Tetapi hal seperti ini tidak terjadi pada kurva Veblen, karena pembeli mengerti penting baru

bagi produk tersebut dan kenyataannya konsumen justru membeli dalam jumlah yang banyak sebesar Q3. Didalam pengaruhnya, harga baru itu telah meningkatkan nilai kesenangan kualitas pelayanan atau pengalaman yang diberikan. Dalam hal ini, kurva permintaan bukan bergeser kebawah, akan tetapi bergeser ke D2 sebagai akibat dari pengaruh permintaan Veblen. Penurunan harga hanya akan meningkatkan sedikit jumlah barang yang dibeli, oleh karena pengaruhnya hanya menurut kurva permintaan baru D2. Ketika dinaikkan lagi menjadi P3, maka harga akan bergeser lagi, tetapi tindakan ini tidaklah membuat kurva permintaan mengalami penurunan menjadi Q4, akan tetapi justru terjadi peningkatan permintaan menjadi Q5.

#### **e. Dampak Pariwisata**

Pengembangan pariwisata pada dasarnya dapat membawa sebagai manfaat bagi masyarakat di daerah. Seperti diungkapkan oleh Soekadijo (2001), manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal, antara lain : pariwisata memungkinkan adanya kontak antara orang-orang dari bagian-bagian dunia yang paling jauh, dengan berbagai Bahasa, ras, kepercayaan, paham, politik, dan tingkat perekonomian. Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan merupakan usaha-usaha yang padat karya, yang membutuhkan jauh

lebih banyak tenaga kerja dibanding dengan usaha lain. Manfaat yang lain adalah pariwisata menyumbang neraca pembayaran, karena wisatawan yang membelanjakan uang yang diterima di Negara yang di kunjunginya. Maka dengan sendirinya penerimaan dari wisatawan mancanegara itu merupakan faktor yang penting agar neraca pembayaran menguntungkan yaitu pemasukan lebih besar dari pengeluaran.

Dampak positif yang langsung diperoleh pemerintah daerah atas pengembangan pariwisata tersebut yakni berupa pajak daerah maupun bukan. Sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada daerah melalui pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah, serta pendapatan lain yang sah berupa pemberian hak atas tanah pemerintah. Dari pajak daerah sendiri, sektor pariwisata memberikan kontribusi berupa pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak minuman beralkohol serta pajak pemanfaatan air bawah tanah.

Menurut Spillane (1987) belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya juga akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan terhadap masyarakat setempat secara langsung maupun tidak, melalui dampak berganda (*multiplier effect*). Dimana di daerah pariwisata dapat menambah pendapatannya dengan menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata dan barang-barang souvenir. Dengan demikian, pariwisata harus dijadikan alternatif untuk mendatangkan keuntungan bagi daerah tersebut.



#### **f. Peranan sektor pariwisata terhadap pendapatan daerah**

Kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya sangat ditentukan atau bergantung dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah dituntut untuk dapat menghidupi dirinya sendiri dengan mengadakan pengelolaan terhadap potensi yang dimiliki, untuk itu usaha guna mendapatkan sumber dana yang tepat merupakan suatu keharusan. Inovasi-inovasi baru dalam memperoleh dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah harus dilakukan, salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan satu dari sumber penerimaan daerah yang diharapkan selalu mengalami peningkatan. Adapun keuntungan yang diberikan sektor pariwisata adalah sebagai berikut menurut Spillane (1987) :

1. Membuka kesempatan kerja, industri pariwisata merupakan kegiatan mata rantai yang sangat panjang, sehingga banyak membuka kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah tersebut
2. Menambah pemasukan dan pendapatan, baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Penambahan ini bisa dilihat dari sisi peningkatan pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, berupa penginapan, restoran, rumah makan, pramuwisata, biro perjalanan dan penyediaan cinderamata. Bagi daerah sendiri kegiatan usaha tersebut merupakan potensi dalam menggali PAD, sehingga perekonomian daerah dapat meningkat
3. Menambah devisa Negara

4. Merangsang pertumbuhan kebudayaan asli
5. Menunjang gerak pembangunan daerah, di daerah pariwisata timbul pembangunan jalan, hotel, restoran dan lain-lain sehingga pembangunan di daerah tersebut lebih maju.

Pariwisata tidak hanya dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempunyai tujuan yang luas meliputi aspek sosial-budaya, politik dan hankamnas. Secara spesifik pengembang pariwisata diharapkan dapat memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan kerja dan kesempatan untuk berusaha, serta mendorong pembangunan daerah. Sektor ini juga diharapkan sebagai penggerak dan pemicu dalam memperbaiki kondisi ekonomi. perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. kegiatan pariwisata menciptakan permintaan, baik permintaan konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa, baik konsumsi maupun barang modal, sehingga nilai tambahnya meningkat. Selama berwisata, wisatawan dengan pengeluaran belanjanya, secara langsung menimbulkan permintaan (*Tourism Final Demand*) pasar barang dan jasa. Selanjutnya *Final Demand* wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang dan bahan baku (*Investment Derived Demand*) untuk memproduksi memenuhi permintaan wisatawan diperlukan investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan

industri produk konsumen, industri jasa, industri rumah makan dan restoran, karenanya pasar barang modal dan bahan baku membesar dan meluas. Yang dengan secara tidak langsung pariwisata menciptakan efek kosumtif bagi rumah tangga. Kegiatan produksi yang diakibatkan oleh *tourism demand* dan *derived investment demand*, menciptakan kesempatan kerja produktif yang memberikan pendapatan pada pekerja dan rumah tangga, yang pada gilirannya pekerja dan anggota rumah tangga penerima pendapatan akan membelanjakan guna membeli barang dan jasa yang diperlukan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ikut pula memperbesar pasar, yang akibatnya menyebabkan peningkatan produksi dan pada akhirnya memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah.

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

1. Menurut Sari (2016) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Belitung” penelitian ini dapat diketahui bahwa keempat variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung, karena nilai probabilitas yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan sebesar 0,05 (taraf nyata = 5%) yang berarti H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif yang diterima dan signifikan antara variabel jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel,

dan jumlah restoran dan rumah makan terhadap penerimaan daerah di Kabupaten Belitung.

2. Penelitian oleh Widiyanto (2013) dengan judul penelitian “Analisis Optimalisasi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (2008-2012)” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang dan untuk menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda, dengan penerimaan daerah sektor pariwisata sebagai variabel dependen dan jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, total pajak restoran, total pajak hotel, total pajak hiburan, dan total retribusi objek wisata sebagai variabel independennya. Berdasarkan metode analisis linear berganda bahwa ada pengaruh antara jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi objek wisata terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata, dimana hal ini di tunjukkan pada analisis koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa sebesar 56,9% penerimaan daerah sektor pariwisata dipengaruhi oleh variabel independen yang ada. Menurut hasil penelitian pada uji hipotesis menunjukkan bahwa ada beberapa variabel yang tidak

berpengaruh terhadap penerimaan daerah Kota Semarang salah satu diantaranya pajak hotel.

3. Penelitian yang hamper serupa seperti penelitian-penelitian diatas adalah penelitian yang di lakukan oleh Qodarrochman (2010) dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penerimaan daerah dari sektor pariwisata di kota semarang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (1994-2008)” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap Penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda, yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel independen dan variabel depende. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa dari keempat variabel yang dianalisis yaitu variabel jumlah objek wisata, variabel jumlah wisatawan dan tingkat hunian hotel dinyatakan signifikan semua, sedangkan untuk variabel pendapatan perkapita dinyatakan tidak signifikan. Hasil output regresi dari F statistik menyimpulkan bahwa keempat variabel independennya secara berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Semarang diterima. Sedangkan menurut hasil output regresi dari t-statistik menyimpulkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata adalah variabel jumlah objek wisata dengan t hitung

sebesar 4,407 dan probabilitas signifikansi sebesar 0,001 Nilai koefisien determinasi R-Square ( $R^2$ ) sebesar 0.85 yang berarti 85% penerimaan daerah sektor pariwisata di Kota Semarang secara bersama-sama dapat dijelaskan oleh variasi dari keempat variabel independen jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian dan pendapatan perkapita.

4. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pleanggra (2012) dalam penelitian tentang “Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatawan dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Objek Pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (2006-2010)” Tujuan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pleanggra (2012), adalah untuk menganalisis pengaruh dari jumlah objek pariwisata, jumlah wisatawan, pendapatan perkapita Jawa Tengah terhadap retribusi objek pariwisata 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan seberapa besar pengaruh dari masing-masing variabel tersebut. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda, yaitu untuk mengetahui hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.
5. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Utama (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Jumlah Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar” Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan dan PHR secara serempak

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gianyar Tahun anggaran 1991-2010. Diantara ketiga variabel yang ada, variabel pajak hotel dan restoran merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Arlina (2013) dengan judul “Analisis Daerah dari Industri Pariwisata di DKI Jakarta dan Faktor yang Mempengaruhinya” Kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini menunjukkan bahwa hasil output regresi dari keempat output variabel independen yaitu jumlah wisatawan nusantara, investasi di industri pariwisata, nilai kurs USD dan faktor keamanan secara bersama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta, dari keempat variabel yang ada variabel faktor keamanan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan animo wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata menuju Indonesia, khususnya Jakarta tidak terlalu dipengaruhi oleh status Indonesia yang dikategorikan tidak aman atau pada saat nilai dummy = 1 sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan daerah dari industri pariwisata di Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 2.1**  
Ringkasan Penelitian Terdahulu

<b>Nama</b>	<b>Variabel</b>	<b>Jenis Analisis</b>	<b>Hasil</b>	<b>Perbedaan</b>
Sari, (2016)  Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kabupaten Belitung	Independen : Jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, jumlah restoran dan rumah makan Dependen : Pendapatan Asli Daerah	Regresi linear berganda	Dari hasil pengujian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini, yaitu : jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel, dan jumlah restoran dan rumah makan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kabupaten Belitung	Studi kasus pada penelitian saat ini adalah Kota Surakarta sedangkan penelitian terdahulu di Kabupaten Belitung
Widiyanto, (2013)  Analisis Optimalisasi Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang dan Faktor-faktor yang	Independen : Jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, total pajak restoran, total pajak hiburan, dan total retribusi objek wisata. Dependen : penerimaan daerah sektor pariwisata	Regresi linear berganda	Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa : jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pajak hotel dan retribusi objek wisata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor	studi kasus penelitian saat ini adalah Kota Surakarta



mempengaruhi ya (2008-2012)			pariwisata. Pajak restoran dan pajak hiburan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata.	
Qadarochman, (2010)  Analisis Penerimaan Daerah di kota Semarang dan Faktor-faktor yang mempengaruhi ya	Independen : jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita. Dependen : Penerimaan daerah dari sektor pariwisata	Regresi linear berganda	Dari keempat variabel yang dianalisis yaitu variabel jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dinyatakan signifikan semua, sedangkan variabel pendapatan perkapita dinyatakan tidak signifikan	Studi kasus penelitian saat ini adalah di kota Surakarta, sedangkan penelitian terdahulu di kota Semarang.
Pleanggra, (2012)  Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor di Kota Semarang dan Faktor-faktor yang mempengaruhi ya	Independen : Jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, pendapatan perkapita. Dependen : Penerimaan daerah sektor pariwisata	Regresi linier berganda	Dari keempat variabel yang dianalisis yaitu jumlah objek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dinyatakan signifikan semua, sedangkan variabel pendapatan perkapita dinyatakan tidak signifikan	studi kasus penelitian saat ini adalah di Kota Surakarta sedangkan pada penelitian terdahulu di Kota Semarang.

<p>Arlina, (2013)</p> <p>Analisis Daerah dari Industri Pariwisata di DKI Jakarta dan Faktor yang Mempengaruhinya</p>	<p>Independen : Jumlah Wisatawan nusantara, dan Mancanegara , Investasi industri pariwisata, nilai kurs (US Dollar), dan faktor keamanan.</p> <p>Dependen : penerimaan daerah dari sektor pariwisata.</p>	<p>Regresi linear berganda</p>	<p>Hasil output regresi menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Profinsi DKI Jakarta. Variabel paling penting berpengaruh adalah jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara. Variabel investasi di industri pariwisata berpengaruh negative dan tidak signifikan hal ini disebabkan karena sistem perpajakan di Profindi DKI Jakarta belum berjalan efektif sehingga potensi pajak belum tergarap secara optimal. Variabel kurs berpengaruh positif dan signifikan, variabel faktor keamanan</p>	<p>Studi kasus penelitian saat ini dilakukan di Kota Surakarta sedangkan pada penelitian terdahulu di Profinsi DKI Jakarta.</p>
--	---	--------------------------------	--	---

			berpengaruh positif dan signifikan karena animo wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata tidak terlalu oleh status Indonesia yang dikategorikan tidak aman pada saat ini nilai dummy = 1 sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan daerah dari industri pariwisata di DKI Jakarta.	
Suartini, Utama (2013)  Pengaruh Jumlah Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar	Independen : Jumlah kunjungan wisatawan, Pajak hiburan, pajak hotel dan restoran. Dependen : Pendapatan asli daerah di Kabupaten Gianyar	Regresi linear berganda	Jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan dan PHR secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gianyar tahun anggaran 1991-2010.	Penelitian saat ini dilakukan di Kota Surakarta sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Gianyar.

Pada penelitian ini penulis menambahkan variabel Jumlah Angkutan Umum sebagai variabel independen yang mempengaruhi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata. Jumlah angkutan umum digunakan sebagai variabel independen karena semakin bertambahnya jumlah angkutan umum maka hal ini akan memberikan

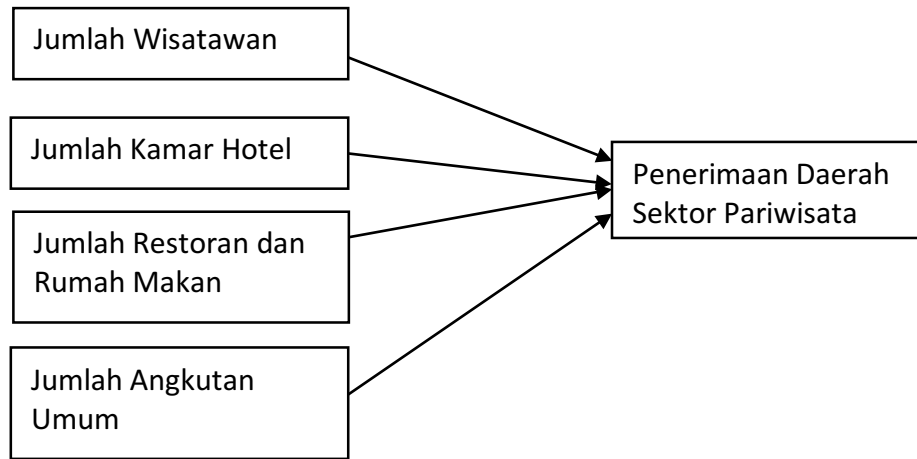
kemudahan akses bagi wisatawan, sehingga akan memberikan pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata.

### **C. Hipotesis**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel Jumlah Wisatawan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Karesidenan Surakarta.
2. Variabel Jumlah Kamar Hotel diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Karesidenan Surakarta.
3. Variabel Jumlah Restoran dan Rumah Makan diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Karesidenan Surakarta.
4. Variabel Jumlah Angkutan Umum diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Karesidenan Surakarta.

#### D. Model Penelitian



**Gambar 2.3**  
Model Penelitian